



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN
NOMOR : 6/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2025

TENTANG

HASIL AKHIR PASCA SANGGAH
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 604/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil Integrasi Pasca Sanggah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II pada pengumuman ini, dengan arti kode pada kolom keterangan sebagai berikut:
 - P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024
 - L : Lulus seleksi CPNS
 - TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
 - TH : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi
- Peserta yang dinyatakan lulus sesuai hasil akhir pasca sanggah pada seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 31 Januari 2025 s.d. 21 Februari 2025, adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Ketentuan
1.	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (perihal pengangkatan CPNS)	<ul style="list-style-type: none">- Dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan mulai tanggal 31 Januari 2025.- Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani memiliki nomor surat yang berbeda, wajib diunggah atau dalam 1 (satu) file.



No	Jenis Dokumen	Ketentuan
2.	Daftar Riwayat Hidup (DRH)	Hasil cetak/print out DRH dari laman https://sscasn.bkn.go.id yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh peserta di atas meterai 10.000.
3.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (perihal pengangkatan CPNS)	Masih berlaku sampai dengan Mei 2025
4.	Surat Keterangan tidak mengonsumsi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya (perihal pengangkatan CPNS)	Ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Pejabat yang berwenang dari Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika yang dibuat dan ditetapkan mulai tanggal 31 Januari 2025.
5.	Surat Pernyataan 5 Poin (lampiran III)	- Format surat terlampir. - Surat diketik menggunakan komputer huruf Arial 12, ditandatangani oleh peserta di atas meterai 10.000.

Catatan: Apabila ada kebutuhan dokumen kelulusan yang belum diatur pada pengumuman ini namun perlu dilengkapi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, peserta diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan dokumen tersebut.

3. Apabila peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana angka 2, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri.
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir pasca sanggah seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh peserta di atas meterai 10.000 sesuai format/*template* yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran IV pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diganti oleh peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman www.mahkamahagung.go.id.
5. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir pasca sanggah seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai Keputusan Pengangkatan CPNS, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).

6. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir pasca sanggah seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung RI berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS.
7. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.mahkamahagung.go.id. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya;
 - f. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Mahkamah Agung atau dari pihak lain, maka hal tersebut merupakan tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2025

Sekretaris Mahkamah Agung
Selaku
Ketua Panitia Seleksi,



Sugiyanto